BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam era pemerintahan modern, pemanfaatan teknologi informasi menjadi pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 menegaskan pentingnya pengembangan *E-Government* untuk mewujudkan *good governance* serta meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik. *E-Government* tidak lagi menjadi opsi, melainkan kebutuhan yang mendesak bagi setiap negara (Muliawaty, dkk, 2020). Indonesia telah mengikuti penilaian *E-Government* oleh PBB sejak tahun 2003 dengan skor *E-Government Development Index (EGDI)* yang terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Secara umum *E-Government* dapat dikatakan sebagai suatu aplikasi berbasis komputer dan internet yang digunakan untuk meningkatkan hubungan dan layanan pemerintah kepada warga masyarakatnya atau yang sering disebut dengan istilah G2C *(Government to Citizen),* hubungan antara pemerintah dengan perusahaan yang sering disebut G2B *(Government to Business)*, bahkan terhadap pemerintah daerah atau negara lain yang sering disebut G2G *(Government to Government)* sebagai mitranya (Indrajit, 2016). Pelaksanaan *E-Government* pada tingkat Pemerintah Daerah dapat dilihat pada hasil Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).

Kabupaten Demak, sebagai bagian dari Pemerintah Daerah di Indonesia, telah menunjukkan komitmennya dalam mengembangkan *E-Government*, antara lain

melalui penerapan aplikasi Elektronik Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (E-SAKIP). Hasil evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun meskipun pada tahun 2021 terjadi penurunan yang dialami oleh seluruh pemerintah daerah karena adanya perubahan metode penilaian.

Tabel 1.1
Indeks SPBE Kab. Demak dan Sekitarnya

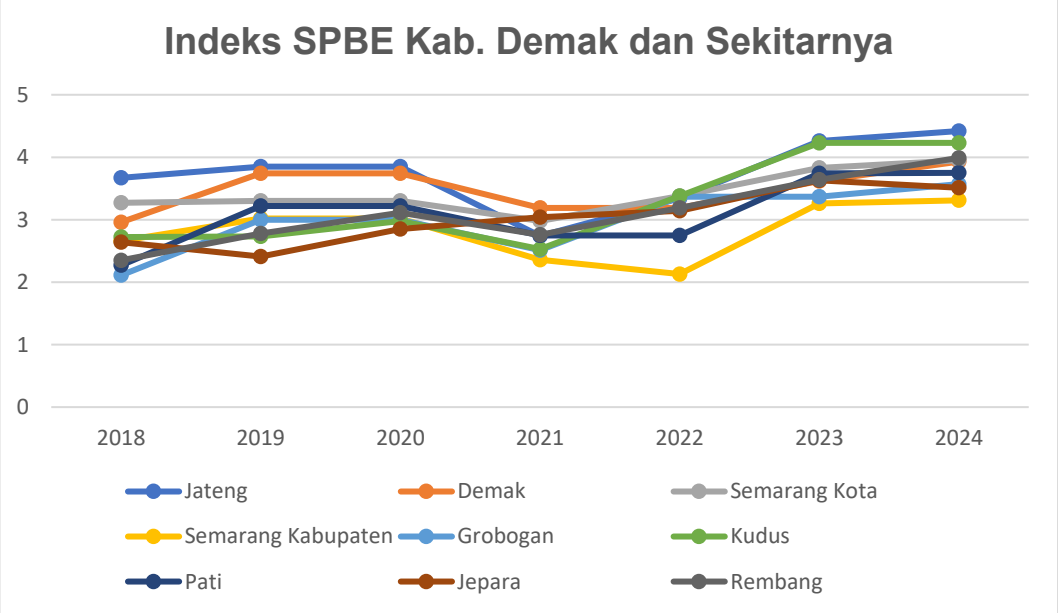

Pemda	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jawa Tengah	3,67	3,85	3,85	2,74	3,34	4,26	4,42
Demak	2,96	3,74	3,74	3,19	3,19	3,62	3,93
Semarang Kota	3,27	3,3	3,3	2,98	3,38	3,83	3,95
Semarang Kab.	2,66	3,02	3,02	2,36	2,13	3,26	3,31
Grobogan	2,11	3	3	2,51	3,37	3,37	3,57
Kudus	2,72	2,73	2,98	2,53	3,38	4,23	4,23
Pati	2,27	3,22	3,22	2,75	2,75	3,74	3,75
Jepara	2,64	2,41	2,85	3,04	3,14	3,63	3,51
Rembang	2,35	2,78	3,11	2,76	3,19	3,64	3,99

Predikat Indeks SPBE

No.	Nilai Indeks	Predikat
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 – < 3,5	Baik
4	1,8 – < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

Sumber : Laporan Evaluasi SPBE KemenPANRB 2018 – 2024

Indeks SPBE Kabupaten Demak menunjukkan hasil sangat baik pada 2023 dan 2024. Hal ini menunjukkan penerapan *E-Government* di Kabupaten Demak sangat baik meskipun belum mencapai nilai maksimal. Penilaian SPBE diukur melalui 4 domain penilaian denga bobot paling tinggi pada domain layanan SPBE.

Tabel 1.2
Komponen Penilaian SPBE Demak 2021 - 2024

No.	Domain Penilaian	Bobot (%)	Nilai		
			2021	2023	2024
1.	Domain 1 - Kebijakan SPBE	13	3,50	3,60	3,60
2.	Domain 2 - Tata Kelola SPBE	25	3,10	3,20	3,80
3.	Domain 3 - Manajemen SPBE	16,5	1,36	2,82	2,82
4.	Domain 4 - Layanan SPBE	45,5	3,82	4,14	4,51

Sumber : Laporan Hasil Evaluasi SPBE Kabupaten Demak Tahun 2021 - 2024

Layanan SPBE terdiri dari layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik. Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik merupakan layanan Sistem Pemerintahan

Berbasis Elektronik yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabillitas Pemerintah Daerah. Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana merupakan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Pemerintah Daerah. Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, kepegawaian, jaringan informasi kearsipan, pengelolaan barang milik daerah, akuntabilitas kinerja organisasi, sasaran kinerja pegawai, layanan pemantauan dan evaluasi perencanaan dan penganggaran, pengawasan internal pemerintah, naskah elektronik, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan. Layanan publik berbasis elektronik meliputi layanan pengaduan pelayanan publik, layanan satu data, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), pengadaan barang dan jasa, dan layanan-layanan publik lain yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.

Salah satu tujuan SPBE adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel (Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018). Tata kelola pemerintahan yang akuntabel dilihat dari hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Meskipin Nilai SAKIP Demak dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak 2021 – 2026 realisasi Nilai SAKIP Demak masih di bawah target sampai akhir kepemimpinan Bupati Demak

2021-2024. Hal ini mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Demak tidak mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) dari pusat.

Tabel 1.3
Nilai SAKIP Demak 2018 – 2024

No	Komponen yang dinilai	Bobot (%)	Nilai				Bobot (%)	Nilai		
			2018	2019	2020	2021		2022	2023	2024
1	Perencanaan Kinerja	30	20,93	21,16	21,46	21,62	30	22,08	21,95	21,75
2	Pengukuran Kinerja	25	14,91	15,13	15,49	15,99	30	19,41	19,47	19,59
3	Pelaporan Kinerja	15	10,18	10,29	10,97	11,39	15	11,42	11,48	11,45
4	Evaluasi Internal	10	5,06	5,44	5,8	6,06	25	16,05	16,18	16,31
5	Capaian Kinerja	20	9,52	11,08	11,23	11,34				
Nilai Hasil Evaluasi		**100**	**60,60**	**63,11**	**64,95**	**66,4**	**100**	**68,96**	**69,08**	**69,10**
Predikat			**Baik**	**Baik**	**Baik**	**Baik**	**Baik**	**Baik**	**Baik**	**Baik**

Sumber : Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Demak 2018 - 2024

Komponen Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja memiliki bobot yang paling tinggi dalam penilaian SAKIP. Beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam komponen Pengukuran Kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (aplikasi) dan pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (aplikasi). Kriteria ini sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Demak melalui layanan SPBE, yaitu layanan akuntabilitas kinerja organisasi dengan aplikasi E-SAKIP Demak yang

dapat diakses melalui http://sakip.demakkab.go.id/ . Aplikasi E-SAKIP Demak adalah aplikasi yang dibangun oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Demak guna melakukan fasilitasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada 41 (empat puluh satu) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.

Hasil evaluasi SAKIP Kabupaten Demak 2016 – 2024 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menunjukkan permasalahan pada aplikasi E-SAKIP. Permasalahan tersebut di antaranya aplikasi E-SAKIP yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Demak belum sepenuhnya digunakan dan dijadikan alat untuk menjamin pencapaian kinerja yang ingin dicapai, pengintegrasian aplikasi E-SAKIP belum berjalan optimal, belum terlihat komitmen dari seluruh unit/satuan kerja untuk memanfaatkan aplikasi E-SAKIP sebagai sarana monitoring dan evaluasi capaian kinerja, dibuktikan belum adanya *feedback* perbaikan dari pimpinan unit/satuan kerja terkait pencapaian kinerja yang tidak tercapai, pengukuran capaian kinerja organisasi melalui E-SAKIP belum dijadikan dasar pemberian *reward* dan *punishment* dalam pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Kondisi ini menunjukkan bahwa *E-Government* di Kabupaten Demak yang diimplementasikan melalui aplikasi E-SAKIP Demak masih belum optimal.

Menurut hasil kajian dan riset dari *Harvard JFK Shool of Government*, untuk menerapkan konsep-konsep digitalisasi pada sektor publik, ada tiga elemen sukses yang harus dimiliki dan diperhatikan sungguh-sungguh. Masing-masing elemen sukses tersebut adalah: *Support, Capacity, dan Value* (Indrajit, 2016). Elemen

Support menunjukkan dukungan implementasi program *E-Government* yang efektif harus dimulai dari para pimpinan pemerintahan yang berada pada level tertinggi. Dukungan implementasi aplikasi E-SAKIP Demak masih sebatas Surat Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah yang merupakan salah satu pimpinan di bawah Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Demak.

Elemen *Capacity* menunjukkan adanya unsur kemampuan atau keberdayaan dari pemerintah setempat dalam mewujudkan "impian" terkait *E-Government* menjadi kenyataan. Informasi yang didapat dari grup *whatsapp* SAKIP Demak ditemukan pengaduan terkait E-SAKIP karena *eror.*

Gambar 1.1
E-SAKIP eror

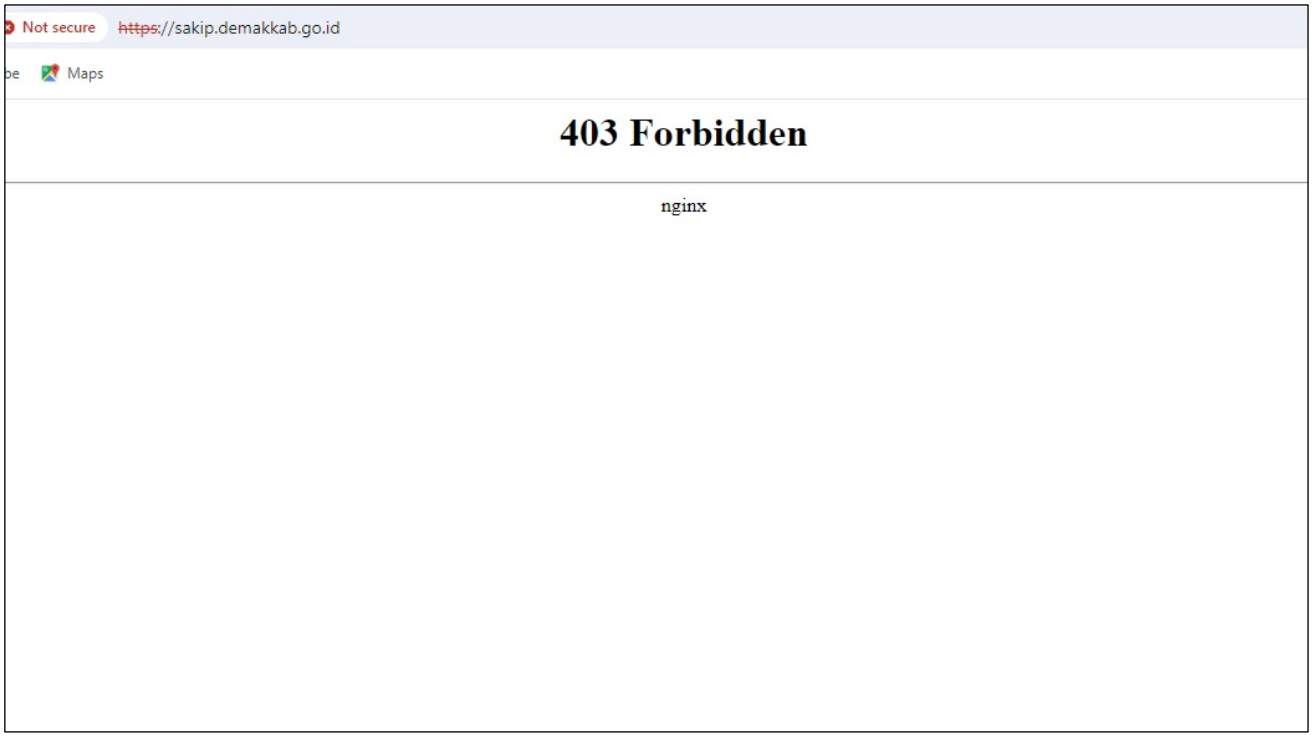

Sumber : Bag. Organisasi Setda Demak, 2024

Elemen *Value* menunjukkan manfaat yang didapat Perangkat Daerah dalam menggunakan aplikasi E-SAKIP Demak. Melalui Surat Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Demak, setiap triwulan seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak diwajibkan untuk melaporkan capaian kinerja organisasi pada aplikasi E-SAKIP Demak. Namun, setiap triwulan hanya beberapa Perangkat Daerah yang melaporkan capaian kinerja pada E-SAKIP Demak tepat waktu. Sebagai contoh pada akhir triwulan 4 tahun 2024 hanya ada 5 dari 41 Perangkat Daerah yang melaporkan capaian kinerjanya melalui E-SAKIP Demak.

Gambar 1.2
Perangkat Daerah yang melaporkan capaian kinerja pada E-SAKIP Demak

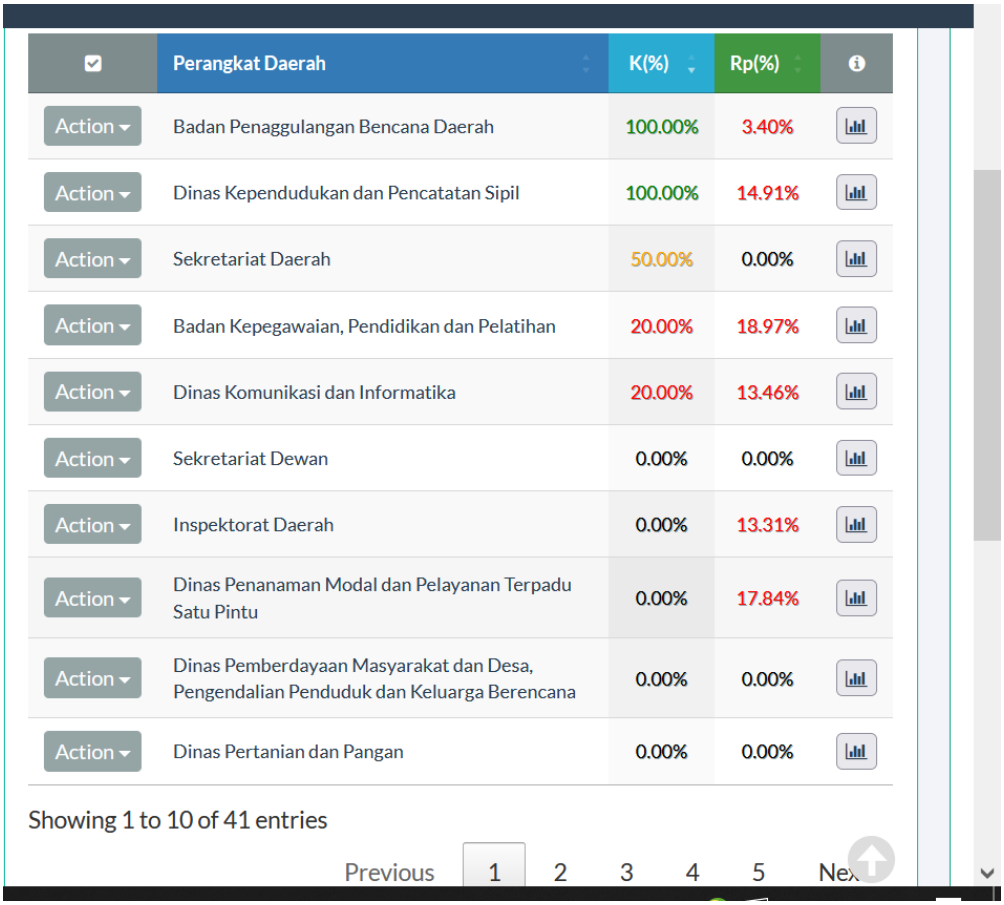

	Perangkat Daerah	K(%)	Rp(%)	
Action	Badan Penaggulangan Bencana Daerah	100.00%	3.40%	
Action	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100.00%	14.91%	
Action	Sekretariat Daerah	50.00%	0.00%	
Action	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	20.00%	18.97%	
Action	Dinas Komunikasi dan Informatika	20.00%	13.46%	
Action	Sekretariat Dewan	0.00%	0.00%	
Action	Inspektorat Daerah	0.00%	13.31%	
Action	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0.00%	17.84%	
Action	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0.00%	0.00%	
Action	Dinas Pertanian dan Pangan	0.00%	0.00%	

Showing 1 to 10 of 41 entries

Previous 1 2 3 4 5 Nex

Sumber : http://sakip.demakkab.go.id/ , 2025 diakses 3 Januari 2025.

Hal ini menunjukkan belum terlihat manfaat aplikasi E-SAKIP sebagai sarana monitoring dan evaluasi capaian kinerja. Berdasarkan permasalahan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tesis di Pemerintah Kabupaten Demak dengan judul : " Elemen *Support, Capacity, Value E-Government* pada aplikasi Elektronik Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (E-SAKIP) Pemerintah Kabupaten Demak".

1.2. Keaslian Penelitian

Penelitian yang dilakukan peneliti ini belum pernah dilakukan penelitian oleh peneliti sebelumnya.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah penelitian ini, yaitu :

1. Mengapa Elemen *Support E-Government* pada aplikasi Elektronik Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (E-SAKIP) Kabupaten Demak belum berjalan optimal?
2. Mengapa Elemen *Capacity E-Government* pada aplikasi Elektronik Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (E-SAKIP) Kabupaten Demak belum mendukung implementasi yang maksimal?
3. Mengapai Elemen *Value E-Government* pada aplikasi Elektronik Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (E-SAKIP) Kabupaten Demak belum memberikan manfaat yang maksimal?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis Elemen *Support E-Government* pada aplikasi Elektronik Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (E-SAKIP) Kabupaten Demak.
2. Untuk menganalisis Elemen *Capacity* (kapasitas) yang tersedia dalam mendukung implementasi aplikasi Elektronik Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (E-SAKIP) Kabupaten Demak.
3. Untuk menganalisis Elemen *Value* (nilai manfaat) yang diperoleh Perangkat Daerah dalam penggunaan aplikasi Elektronik Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (E-SAKIP) Kabupaten Demak.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis dan praktis. Kegunaan dua aspek ini dijabarkan sebagai berikut :

1. Secara teoritis : menjadi referensi ilmiah terkait penerapan elemen *support, capacity* dan *value* dalam pengembangan *E-Government*, khususnya pada layanan akuntabilitas kinerja organisasi.
2. Secara praktis : memberikan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Demak dalam meningkatkan efektivitas penerapan aplikasi Elektronik Sistem Akuntabilitas Kinerja Organisasi (E-SAKIP) melalui perbaikan pada aspek *support, capacity* dan *value*.

1.6. Tinjauan Pustaka

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 1.4
Matriks penelitian terdahulu

No.	Judul, Peneliti, Tahun Terbit	Teori	Metode Penelitian	Hasil
1.	Prospek penerapan *E-Government* di Kabupaten Demak, Utomo, dkk, 2004	*E-Government* *a. Support* *b. Capacity* *c. Value*	Kualitatif Deskriptif	Komitmen Pemerintah Daerah dalam mengembangkan *E-Government* sudah ada ditandai dengan membangun situs web Pemerintah Daerah dengan nama Demak.go.id. Agar pengembangan *E-Government* mampu memberikan manfaat bagi masyarakat maka Pemerintah Daerah harus sudah memiliki landasan hukum yang kuat sebagai acuan dalam pengembangan *E-Government*, dan penyiapan SDM harus dilakukan secara kontinyu serta pembangunan infrastruktur yang mampu mendukung terciptanya *E-Government* yang dapat dinikmati oleh masyarakat secara murah dan mudah tanpa melihat tingkatan masyarakat.
2.	Analisis Pengembangan *Electronic Government* di Kabupaten Demak (Studi Kasus *Website* Pemerintah	*E-Government* *a. Support* *b. Capacity* *c. Value*	Kualitatif Deskriptif	Di Kabupaten Demak sudah diterapkan pelayanan yang berbasis *e-government* khususnya mengenai keberadaan sebuah website Pemerintah Kabupaten Demak. Hingga saat ini program ini sudah berjalan cukup baik, namun masih perlu

	Kabupaten Demak) (Jatmiko, dkk, 2018)			ditingkatkan
3.	Penerapan *E-Planning* sebagai bentuk Sistem Perencanaan Daerah Berbasis Teknologi di Kabupaten Demak Tahun 2018 – 2019 (Maharani, dkk, 2020)	Implementasi	Kualitatif Deskriptif	Aplikasi *E-Planning* yang dijalankan masih dalam tahap *web presence* karena ketika dilihat dalam penerapannya *website E-Planning* tidak memberikan ruang yang interaktif bagi masyarakat.
4.	Model Digitalisasi Layanan Administrasi Sektor Publik (Studi Layanan Administrasi Anggota Legislatif pada Komisi XI Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) (Nugraha, dkk, 2023)	*E-Government* *a. Support* *b. Capacity* *c. Value*	Kualitatif	*Support* menunjukan bahwa dukungan masih berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan normatif, maksudnya adalah sumber daya memfokuskan pada kebutuhan rutin komisi XI dalam rangka mendukung anggota DPR. *Capacity* dimana Komizi XI memiliki dukungan pada kapasitas sumber daya namun masih belum memiliki kapasitas infrastruktur teknologi informasi guna mendukung digitalisasi administrasi. *Value* yang diperoleh masih memfokuskan pada pemanfaatan rutin dalam pengetikan dokumen dan pelaksanaan peralatan rapat, belum menyentuh *value* dalam efektivitas penggunaan teknologi inforamsi admnistrasi dalam rangka efisiensi dan efektivitas.
5.	Penerapan *E-Government* dalam Pelayanan Publik di Kelurahan Tondo Kota Palu (Susanto, dkk, 2024)	*E-Government* *a. Support* *b. Capacity* *c. Value*	Kualitatif Deskriptif	Penerapan *E-Government* di Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu sudah berjalan dengan baik karena telah didukung dengan adanya aturan yang mendukung penerapan *E-Government* serta sarana dan prasarana yang

				cukup memadai dalam pelaksanaan penerapan pelayanan secara elektronik.
6.	Penerapan Pelayanan Publik Berbasis *E-Governance* Pada Era Revolusi Industri 4.0 (Prihartono, Djakit, 2023)	*E-Governance* *a. Support* *b. Capacity* *c. Value*	Kualitatif Studi Pustaka	*Support* merupakan elemen pertama dan yang paling krusial yang harus dimiliki oleh Pemerintah pusat dan pemerintah daerah. *Capacity*, yakni adanya unsur kemampuan atau keberdayaan dari Pemerintah dalam mewujudkan *E-Government* dalam pelayanan publik menjadi kenyataan. *Value,* artinya berbagai inisiatif *E-Government* tidak akan ada gunanya jika tidak ada pihak yang merasa diuntungkan dengan adanya implementasi konsep tersebut dan dalam hal ini, yang menentukan besar tidaknya manfaat yang diperoleh dengan adanya E-*Government* bukanlah kalangan pemerintah sendiri, melainkan masyarakat dan merekalah yang berkepentingan *(demand side).*
7.	Penerapan Kebijakan *E-Government* dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Publik di UPTD Pelatihan Kerja Kabupaten Bandung (Sumarna, 2024)	*E-Government* *a. Support* *b. Capacity* *c. Value*	Kualitatif Deskriptif	*Support* menunjukkan bahwa kebijakan *E-Government* telah jelas dan dipahami oleh pegawai kantor UPTD Pelatihan Kerja yang dapat dengan mudah dilaksanakan melalui SOP yang ada. *Capacity* sumber daya manusia di Kantor UPTD Pelatihan Kerja Kabupaten Bandung telah mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, namun hal ini tidak diimbangi dengan sumber daya peralatan dan minimnya anggaran yang tersedia. *Value* yang akan diperoleh masyarakat sebagai penerima layanan dan petugas sebagai pelaksana dapat ditunjukan bahwa peranan fungsi *website*

				masih sangat terbatas yang ditandai oleh kurangnya fungsi sarana penyebaran informasi, fungsi sosialisasi kebijakan, dan penghubung interaksi antara pemerintah dengan masyarakat yang menyebabkan keterbukaan informasi pelayanan sebagian besar masih bersifat *offline.*
8.	Analisis Elemen Sukses Pengembangan Layanan Publik Berbasis *E-Government* di Kota Padang (Rusnita, dkk, 2023)	*E-Government* *a. Support* *b. Capacity* *c. Value*	Kualitatif Deskriptif	Pada elemen *support*, Pemerintah Kota Padang menunjukkan komitmen pengembangan melalui produk hukum baik itu PERDA dan visi misi serta perencanaan pengembangan yang berlenajutan melalui *masterplan smart city* Kota Padang. Elemen *capacity* masih terdapat kekurangan di antaranya infrastuktur keamanan aplikasi dan *server* yang belum memadai, SDM yang masih kurang serta keterbatasan dalam hal anggaran yang menghambat proses pengembangan aplikasi maupun *website E-Government.* Pada elemen *Value* sudah terpenuhi dengan baik karena memberikan manfaat baik bagi pemerintah maupun masyarakat Kota Padang.
9.	Penerapan Konsep-Konsep Digitalisasi dalam Pelayanan Publik di Kantor Desa Manunggal Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara (Christover, dkk, 2023)	*a. Support* (Dukungan) *b. Capacity* (Kapasitas) *c. Value*	Kualitatif	Elemen *support* hanya berada di pihak Pemerintah Desa, Ketua RT dan Organisasi Karang Taruna, dan belum sampai kepada masyarakat Desa secara luas. Hal ini menunjukan bahwa penerapan konsep digitalisasi dalam pelayanan publik di Kantor Desa masih belum dijadikan prioritas. Elemen *Capacity* (kapasitas), peningkatan kapasitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah menjadi faktor krusial dalam penerapan konsep digitalisasi. Kapasitas

				Sumber daya manusia dalam penerapan konsep digitalisasi khususnya *staff* yang mengelola *website* desa hanya satu *staff*, dan untuk *staff* yang lain masih dalam tahap pelatihan. Selain itu, *server* yang digunakan dalam penerapan konsep digitalisasi pada pelayanan publik masih berupa *website* desa. Penyimpanan data masih mengandalkan komputer penyimpanan lokal. Di sisi lain, anggaran yang digunakan berasal dari Anggaran Dana Desa (ADD), di mana hal ini menunjukkan keterbatasan dalam segi kapasitas pendanaan yang dapat mempengaruhi kelancaran dan kualitas penerapan konsep digitalisasi. Elemen *Value* (Manfaat) Penerapan konsep digitalisasi harus memberikan nilai tambah yang jelas dan signifikan bagi pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait karena masih sedikit masyarakat yang mengetahui atau menggunakan *website* tersebut, manfaat dari konsep digitalisasi belum dirasakan secara luas oleh masyarakat desa
10.	Analisis Pengembangan *E-Government* pada Layanan Administrasi Pemerintahan (Studi pada "SURADI" di Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Malang) (Ratnasari, dkk, 2022)	*E-Government* *a. Support* *b. Capacity* *c. Value*	Kualitatif Deskriptif	Pengembangan SURADI sebagai sistem pemerintah berbasis elektronik telah memenuhi lima elemen pengembangan *E-Government* dengan baik, yaitu meliputi *support, capacity, value, willingness* dan *local culture.*

11.	*E-Government Icore*: Meningkatkan Pelayanan Publik Berbasis Aplikasi di Kabupaten Pangkep (Malik, 2024)	*E-Government* *a. Support* *b. Capacity* *c. Value*	Kualitatif Deskriptif	Pertama, pentingnya dukungan pemerintah, baik dari segi kebijakan maupun alokasi anggaran, menjadi landasan utama dalam keberhasilan implementasi *E-Government*. Adanya *political will* yang kuat dari pimpinan pemerintahan, terutama dalam hal penyediaan dukungan dan sumber daya, menjadi kunci bagi keberhasilan inisiatif *E-Government*. Kedua, kapasitas organisasi menjadi faktor krusial dalam menjalankan *E-Government.* Hal ini mencakup ketersediaan anggaran oleh pemerintah daerah, infrastruktur teknologi informasi yang memadai, serta kebijakan dan regulasi yang mendukung. Terakhir, manfaat yang dirasakan oleh masyarakat menjadi tolok ukur keberhasilan implementasi *E-Government.* Penilaian positif dari pengguna terhadap aplikasi iCore, sebagaimana tercermin dalam tingginya angka penilaian bintang 5, menjadi bukti nyata dari manfaat yang dirasakan oleh masyarakat.
12.	Pelayanan Publik Berbasis *E-Goverment* dalam Aplikasi E-Pusluh di Bidang Penyuluhan Kota Palu (Oktavianti, dkk, 2024)	*E-Government* *a. Support* *b. Capacity* *c. Value*	Kualitatif Deskriptif	*Support* atau dukungan dari pimpinan pemerintah berupa Peraturan Presiden tentang penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, regulasi tentang penerapan *E-Government* secara umum di Provinsi Sulawesi Tengah dan sosialisasi E-Pusluh. *Capacity* atau keberdayaan dari tersedianya Sumber Daya Infrastruktur teknologi informasi seperti komputer, print dan wifi cukup memadai serta tersedianya Sumber Daya Manusia yang berkompeten dalam

				menjalankan Pelayanan berbasis *E-Government*. Elemen *value,* yakni manfaat yang dirasakan oleh penyuluh Dinas Ketahanan Pangan kota Palu yakni memberikan kemudahan baik bagi pihak petugas maupun penyuluh dalam pelaporan kegiatan penyuluh pertanian. Manfaat yang dirasakan oleh penyuluh dapat menghemat waktu tanpa perlu mengantri, pelayanan *online* juga dapat menghemat biaya juga transportasi
13.	Kesiapan Elemen *Support, Capacity* dan *Value* Untuk Pengembangan *E-Government* Pada Aplikasi "Miton" Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur (Fahik, dkk, 2024)	*E-Government* *a. Support* *b. Capacity* c. *Value*	Kuantitatif Deskriptif	Tingkat kesiapan *Elemen Support, Capacity* dan *Value* untuk pengembangan *E-Government* pada Aplikasi Miton tinggi dengan ratarata prosentase ketiga elemen itu adalah berada pada kisaran angka prosentase sebesar 75,5 %. Poin penting hasil penelitian 1) Ada Peran Pimpinan daerah dan *legislative* dalam mendukung aplikasi ini, 2) SDM yang berkompeten yang direkrut dengan sistim merit berhasil mengatasi masalah-masalah pemanfaatan aplikasi. 3) Faktor *leadership* berperan dalam suksesnya aplikasi ini 4) Aplikasi Miton membantu mewujudkan *good governance* khususnya *transparency, responsive, consensus orientation, good governance* untuk mendapatkan solusi/jalan keluar terbaik terhadap suatu persoalan dan *procedural* serta *effectiveness and efficiency* untuk menjalankan proses-proses Pembangunan.

14.	Pelayanan Administrasi Kependudukan melalui Program Simpelin ditinjau dari Perspektif *E-Government* di Kabupaten Sukabumi, (Maudina, dkk, 2024)	*E-Government* *a. Support* *b. Capacity* c. *Value*	Kuantitatif Deskriptif	1. Dimensi *Support* sebesar 1.496 dengan kategori efektif, dimana perolehan nilai indikator tertinggi pada dimensi ini terdapat pada indikator Kalimat yang digunakan mudah dimengerti oleh pengguna yang mengakses SIMPELIN, dan perolehan nilai indikator terendah pada dimensi ini terdapat pada indikator Informasi mengenai program SIMPELIN belum disosialisasikan oleh kecamatan/RT/RW secara merata, dan menyeluruh kepada masyarakat. 2. Tingkat keberhasilan dimensi *Capacity* sebesar 1.462 di mana perolehan nilai tertinggi pada dimensi ini terdapat pada indikator Pegawai mampu menyelesaikan dokumen yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, perolehan nilai terendah pada dimensi ini terdapat pada indikator Akses internet yang memadai untuk menunjang kesiapan kegiatan-kegiatan pemerintahan yang berbasis teknologi. 3. Tingkat keberhasilan dimensi *Value* sebesar 1.406, dimana perolehan nilai tertinggi pada dimensi ini terdapat pada indikator SIMPELIN dapat dilakukan 24 jam. Sedangkan nilai terendah pada dimensi ini terdapat pada indikator Program SIMPELIN lebih baik dari pelayanan *offline*
15.	Pengaruh Penerapan *E-Government* Terhadap	1. *E-Government* (X)	Kuantitatif	Adanya penerapan *E-Government* melalui *Sleman Smart Apps* di Kabupaten Sleman menunjukkan bahwa terdapat

	Kualitas Layanan Publik di Kabupaten Sleman (Ariani, dkk, 2023)	*a. Support* *b. Capacity* *c. Value* 2. Kualitas Layanan Publik (Y)		pengaruh (positif) yang signifikan dari penerapan *E-Government* melalui *Sleman Smart Apps* terhadap kualitas layanan publik di Kabupaten Sleman
16.	Pengaruh Penerapan Sistem Informasi *E-Government* Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Nurindahsari, dkk 2022)	1. Sistem informasi *e-Government* (X) 2. Transparansi pengelolaan keuangan daerah (Y_1) 3. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y_2)	Kuantitatif	1. 71,2% Sistem Informasi *E-Government* berpengaruh secara signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah 2. 2,2% berpengaruh secara tidak signifikan terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah 3. 26,6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak ada dalam penelitian
17.	Pengaruh *E-Planning, E-Budgeting*, dan *E-Procurement* Terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Apriliani, dkk, 2023)	1. *E-Planning* (X_1) 2. *E-Budgeting* (X_2)	Kuantitatif	1. Variabel *E-Planning* dan *E-Budgeting* tidak memiliki berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah di Jawa Tengah. 2. Variabel *E-Procurement*, memberi bukti empiris pengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah di Jawa Tengah.

		3. *E-Procurement* (X_3) 4. Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Y)		3. Praktik *E-Planning*, *E-Budgeting* dan *E-Procurement* di Jawa Tengah masih sangat rendah sehingga SAKIP tidak bisa terpengaruh
18.	Pengaruh Penerapan *E-Government* Terhadap Kinerja Pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Kurnia, dkk, 2023)	1. *E-Government* (X) *a. Support* *b. Capacity* *c. Value* 2. Kinerja Pegawai (Y)	Kuantitatif	1. Nilai koefisien determinasi 0.512 atau sebesar 51.2% menunjukkan *E-government* mempunyai pengaruh yang tidak terlalu besar terhadap kinerja pegawai sehingga belum bisa dikatakan signifikan 2. Penerapan *E-Government* di Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara belum terealisasi dengan baik sehingga manfaat *E-Government* belum bisa dirasakan sepenuhnya dalam peningkatan kinerja para pegawai.
19.	Sistem Informasi Prioritas untuk Layanan Publik pada Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota	*socio technical system*	*Mix Method*	Terdapat 24 sistem informasi atau aplikasi yang dikategorikan mudah diakses dan memiliki *impact* yang tinggi *(high-easy)* meliputi 14 sistem informasi layanan pemerintahan dan 10 layanan publik. Terkait layanan publik

	Palangkaraya (Hamjen, H, 2023)			maka sistem informasi yang mudah diakses dan memiliki *impact* yang tinggi untuk layanan publik adalah sistem informasi layanan Covid-19, Mal Pelayanan Publik, Layanan Perpustakaan, layanan pengadaan secara elektronik, Forum CSR, layanan Email, Layanan *Cloud*, Layanan Dokumentasi dan Informasi hukum, sistem pengajuan hibah keagamaan
20.	*Impact of Government Capacity and E-Government Performance on the Adoption of E-Government Services* (Mensah, 2019)	1. Persepsi kegunaan 2. Niat untuk merekomendasikan 3. Kapasitas pemerintah 4. Kinerja *E-Government*	Kuantitatif	Kapasitas pemerintah dan kinerja pemerintah merupakan penentu signifikan terhadap persepsi manfaat layanan *E-Government.* Kapasitas pemerintah terbukti dapat memprediksi kinerja *E-Government* secara positif. Persepsi manfaat layanan *E-Government* ditemukan sebagai prediktor signifikan terhadap niat untuk merekomendasikan adopsi layanan *E-Government*.

Sumber : Data diolah, 2024

Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan oleh penulis maka dapat disimpulkan bahwa terdapat kesinambungan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang mengkaji penerapan *E-Government* di berbagai daerah di Indonesia, dengan fokus pada elemen *support, capacity*, dan value (Indrajit, 2016). Namun, belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji aplikasi Elektronik Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (E-SAKIP) di Kabupaten Demak. Fokus penelitian sebelumnya lebih banyak pada penggunaan website pemerintah atau aplikasi lain yang belum secara mendalam menelaah dimensi Elektronik Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (E-SAKIP) sebagai instrumen akuntabilitas kinerja organisasi. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki nilai kebaruan dalam konteks lokal Kabupaten Demak.

1.6.2 Administrasi Publik

Administrasi publik, menurut Chandler dan Plano (dalam Keban 2014) adalah proses dimana sumber daya dan personel pubik diorganisir dan dikooordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola *(memanage)* keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Kedua pengarang tersebut juga menjelaskan bahwa administrasi publik merupakan seni dan ilmu *(art and science)* yang ditujukan untuk mengatur *public affairs* dan melaksanakan berbagai tugas yang telah ditetapkan dan sebagai suatu disiplin ilmu, administrasi publik bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah publik melalui perbaikan atau penyempurnaan terutama di bidang organisasi, sumberdaya manusia dan keuangan. McCurdy dalam (Keban 2014) mengemukakan bahwa administrasi publik dapat

dilihat sebagai suatu poses politik, yaitu sebagai salah satu cara metode memerintah suatu negara dan dapat juga dianggap sebagai cara yang prinsipil untuk melakukan berbagai fungsi negara. Dengan kata lain administrasi publik bukan hanya sekedar persoalan manajerial tetapi juga persoalan politik. Anggapan ini mungkin membingungkan pendefinisian administrasi publik, termasuk ruang lingkupnya. Akan tetapi hal ini justru menunjukkan bahwa dunia administrasi publik itu terus mengalami perkembangan dan justru sulit untuk dipisahkan dari dunia politik.

Menurut Nicholas Henry dalam (Keban 2014) paradigma dalam administrasi negara, seperti diuraikan berikut ini: Paradigma 1 (1900-1926) dikenal sebagai paradigma Dikotomi Politik dan Administrasi. Tokoh-tokoh dari paradigma tersebut adalah Frank J. Goodnow dan Leonard D. White. Goodnow dalam tulisannya yang berjudul *"Politics and Administration"* pada tahun 1900 mengungkapkan bahwa politik harus memusatkan perhatiannya pada kebijakan atau ekspresi kehendak rakyat, sedangkan administrasi memberi perhatiannya pada pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan atau kehendak tersebut. Pemisahan antara politik dan administrasi ini dimanifestasikan oleh pemisahan antara badan legislatif yang bertugas mengekspresi kehendak rakyat dengan badan eksekutif yang bertugas mengimplementasikan kehendak rakyat tersebut. Badan judikatif dalam hal ini berfungsi membantu badan legislatif dalam menentukan tujuan dan merumuskan kebijakan. Implikasi dari paradigma tersebut adalah bahwa administrasi harus dilihat sebagai sesuatu yang bebas nilai dan diarahkan untuk mencapai efisiensi dan ekonomi dari *government bureaucracy*. Paradigma 2 (1927-1937) disebut sebagai paradigma Prinsip-Prinsip Administrasi. Tokoh-tokoh terkenal dari paradigma ini adalah Willoughby, Gullick & Urwick, yang sangat

dipengaruhi oleh tokoh-tokoh manajemen klasik seperti Fayol dan Taylor. Mereka memperkenalkan prinsip-prinspi administrasi sebagai fokus administrasi publik. prinsip-prinsip tersebut dituangkan dalam apa yang disebut sebagai POSDCORB *(Planning, Organizing, Staffing, Directing, Controlling, Reporting, Budgeting)* yang menurut mereka dapat diterapkan dimana saja, atau bersifat unversal. Sedangkan lokus administrasi publik tidak pernah diungkapkan secara jelas karena mereka beranggapan bahwa prinsip-prinsip tersebut dapat berlaku dimana saja termasuk di organisasi pemerintah.

Paradigma 3 (1950-1970) adalah paradigma Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik. Morstein-Marx adalah seorang editor buku "*Elements of Public Administration"* di tahun 1946 mempertanyakan pemisahan politik dan administrasi sebagai suatu yang tidak mungkin atau tidak realistis, sementara Herbert Simon mengarahkan kritikannya terhadap ketidak konsistenan prinsip administrasi dan menilai bahwa prinsip-prinsip tersebut tidak berlaku universal. Akibatnya muncul paradigma baru yang menganggap administrasi publik sebagai ilmu politik di mana lokusnya adalah birokrasi pemerintahan, sedang fokusnya menjadi kabur karena prinsip-prinsip administrasi publik mengandung banyak kelemahan. Sayangnya, mereka yang mengajukan kritikan terhadap prinsip- prinsip administrasi tidak memberi jalan keluar tentang fokus yang digunakan dalam administrasi publik. Paradigma 4 (1956-1970) adalah Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi. Dalam paradigma ini prinsip-prinsip manajemen yang pernah populer sebelumnya, dikembangkan secara ilmiah dan mendalam. Perilaku organisasi, analisis manajemen, penerapan teknologi modern seperti metode kuantitatif, analisis sistem, riset operasi dsb merupakan fokus dari paradigma ini.

Dua arah perkembangan terjadi dalam paradigma ini, yaitu yang berorientasi kepada perkembangan ilmu administrasi murni yang didukung oleh disiplin psikologi sosial dan yang berorientasi pada kebijakan publik. Semua fokus yang dikembangkan di sini diasumsikan dapat diterapkan tidak hanya dalam dunia bisnis, tetapi juga dalam dunia administrasi publik. Karena itu lokusnya, menjadi tidak lepas. Paradigma 5 (1970 an) Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik. Paradigma tersebut telah memiliki fokus dan lokus yang jelas. Fokus administrasi publik dalam paradigma ini adalah teori organisasi, teori manajemen dan kebijakan publik; sedangkan lokusnya adalah masalah-masalah dan kepentingan-kepentingan publik. Paradigma 6 (1990-sekarang) *Governance.* Paradigma yang terakhir merupakan paradigma terbaru dari ilmu administrasi publik dalam tatanan pengelolaan pemerintah. Menurut (Santosa,2008) paradigma ini didefinisikan memiliki tiga tiang dalam *governance* yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sehingga dapat dijelaskan bahwa paradigma ini menegaskan terkait elemen dalam administrasi publik sehingga tidak berfokus kepada pemerintah saja melainkan juga berfokus pada masyarakat dan sektor swasta.

Berdasarkan pengertian dari Nicholas Henry maka penelitian ini cenderung mengarah kepada paradigma kelima. Paradigma kelima telah memiliki fokus yang jelas dengan teori kebijakan publik. Lokusnya adalah masalah-masalah kepentingan publik. Pemerintah Kabupaten Demak memiliki masalah dalam penggunaan aplikasi E-SAKIP.

1.6.3 Kebijakan Publik

Thomas Dye (1981) mendefinisikan kebijakan publik adalah apapun yang dilakukan pemerintah maupun yang tidak dilakukan (*status quo*). Contohnya adalah

pada saat ada kerusakan jalan raya, pemerintah mengetahui permasalahan tersebut tetapi memilih untuk tidak melakukan apa-apa yang berarti pemerintah telah mengambil kebijakan. Definisi menurut Thomas Dye ini bermakna bahwa kebijakan publik dibuat oleh pemerintah bukan swasta dan merupakan pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan publik (Subarsono, 2015).

David Easton berpandangan bahwa pemerintah mengalokasikan nilai-nilai dalam pembuatan kebijakan publik kepada masyarakat sehingga kebijakan publik tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat (Subarsono, 2015). Carl Friedrich (dalam Winarno 2007) mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan dan peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.

James Anderson (dalam Winarno 2007) mendefinisikan kebijakan publik merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. W.I. Jenkins (dalam Wahab 2015) berpendapat bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara untuk mencapainya dalam suatu situasi. Berdasarkan beberapa definisi di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan adalah suatu hal

yang baik dilakukan maupun tidak dilakukan oleh pemerintah dengan mengalokasikan nilai publik ke dalam pembuatan kebijakan yang telah disepakati untuk mencapai tujuan guna mengatasi permasalahan publik. Siklus kebijakan publik adalah formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Kegiatan politis tersebut akan nampak dalam rentetan proses kebijakan menuurut William Dunn (dalam Subarsono, 2015) yang meliputi penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan.

E-Government memiliki keterkaitan yang erat dengan kebijakan publik. *E-government* dapat terintegrasi dalam siklus kebijakan publik, mulai dari perumusan, implementasi, hingga evaluasi kebijakan. *E-government* dapat mendukung praktik tata kelola pemerintahan yang baik dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan legitimasi pemerintah.

1.6.4 *E-Government*

E-Government didefinisikan sebagai penggunaan teknologi dan aplikasi berbasis *web* oleh pemerintah, atau layanan elektronik, yang meningkatkan akses dan penyampaian layanan dan informasi pemerintah kepada warga negara, penduduk, bisnis, pemerintah, dan entitas terkait lainnya (Layne dan Lee dalam Kumar, 2021). *E-Government* merupakan bagian penting dari pemerintahan digital yang berkaitan dengan penyediaan layanan publik melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya dengan penggunaan internet virtual (Gant dalam Mensah, 2019). Bank Dunia *(World Bank)* (dalam Indrajit, 2016) mendefinisikan *E-Government* sebagai berikut: *E-Government refers to the use by government agencies of information tehnologies (such as Wide Area Networks, the*

Internet, and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizens, businesses, and other arms of government. Berdasarkan definisi di atas dapat diartikan bahwa *E-Government* mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh lembaga pemerintah (seperti *Wide Area Networks*, Internet, dan komputasi seluler) yang memiliki kemampuan untuk mentransformasikan hubungan dengan warga negara, bisnis, dan lembaga pemerintah lainnya.

Di sisi lain, UNDP *(United Nation Development Programme)* (dalam Indrajit, 2016) mendefinisikannya secara lebih sederhana, yaitu: *E-government is the application of Information and Communication Technology (ICT) by government agencies. E-Government* adalah penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) oleh instansi pemerintah. Tanpa mengecilkan arti dari beragam contoh definisi yang telah dipaparkan sebelumnya, setidak-tidaknya ada 3 (tiga) kesamaan karakteristik dari setiap defnisi *e-Government*, yaitu masing-masing adalah:

a. Merupakan suatu mekanisme interaksi baru (moderen) antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan *(stakeholder)*
b. Melibatkan penggunaan teknologi informasi (terutama internet)
c. Memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan publik.

E-government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya (Indrajit, 2016) meliputi :

1. *Government to Citizen (G2C)* ialah sebuah tipe dari hubungan pemerintah dengan masyarakat. Hubungan ini bertujuan untuk dapat memperbaiki hubungan interaksi di antara pemerintah dengan masyarakat serta untuk

mempermudah masyarakat di dalam mencari berbagai informasi mengenai pemerintahan.

2. *Government to Business (G2B)* ialah sebuah tipe dari hubungan pemerintah dengan bisnis karena sangatlah dibutuhkan relasi yang sangat baik, di antara pemerintah dengan kalangan bisnis dan tujuannya ialah demi sebuah kemudahan berbisnis masyarakat dari kalangan pebisnis.
3. *Government to Goverment (G2G)* ialah sebuah tipe dari hubungan pemerintah dengan pemerintah lainnya. Hubungan ini bertujuan agar dapat memenuhi berbagai macam informasi yang dibutuhkan di antara pemerintah yang satu dengan pemerintah lainnya untuk memperlancar dan juga mempermudah sebuah kerjasama di antara pemerintah-pemerintah yang bersangkutan.
4. *Government to Employees (G2E)* ialah sebuah tipe hubungan antara pemerintah dengan pegawainya. Hubungan ini bertujuan agar para pegawai pemerintahan ataupun pegawai negeri dapat meningkatkan kinerja beserta kesejahteraan dari para pegawai yang bekerja pada salah satu institusi pemerintah.

Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 menyebutkan *E-government* adalah penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik (teknologi informasi dan komunikasi) untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat, komunitas bisnis, dan kelompok terkait lainnya menuju *good governance*. Berdasarkan beberapa definisi tentang *e-government* dapat disimpulkan bahwa *e-government* adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan para *stakeholders*nya, yaitu masyarakat, sektor bisnis dan antar pemerintah baik pada level yang sama maupun dengan level pemerintahan yang lebih tinggi.

Menurut hasil kajian dan riset dari Harvard JFK *School of Government*, untuk menerapkan konsep-konsep digitalisasi pada sektor publik, ada 3 (tiga) elemen sukses *E-Government* yang harus dimiliki dan diperhatikan sungguh-sungguh. Masing-masing elemen sukses tersebut adalah*: Support, Capacity*, dan *Value* (Indrajit, 2016).

1. *Support*

   Elemen pertama dan paling krusial yang harus dimiliki oleh pemerintah adalah keinginan (intent) dari berbagai kalangan pejabat publik dan politik untuk benar-benar menerapkan konsep *E-Government*, bukan hanya sekedar mengikuti trend atau justru menentang inisiatif yang berkaitan dengan prinsip-prinsip *E-Government*. Tanpa adanya unsur *"political will"* ini, mustahil berbagai inisiatif pembangunan dan pengembangan *E-Government* dapat berjalan dengan mulus karena budaya birokrasi cenderung bekerja berdasarkan model manajemen *"top down"* maka jelas dukungan implementasi program *E-Government* yang efektif harus dimulai dari para pimpinan pemerintahan yang berada pada level tertinggi (Presiden dan para pembatunya – Menteri) sebelum merambat ke level-level di bawahnya (Eselon 1, Eselon 2, Eselon 3, dan seterusnya). Yang dimaksud dengan dukungan di sini juga bukanlah hanya pada omongan semata, namun lebih jauh lagi dukungan yang diharapkan adalah dalam bentuk hal-hal sebagai berikut:

   a. Disepakatinya kerangka *E-Government* sebagai salah satu kunci sukses negara dalam mencapai visi dan misi bangsanya sehingga harus diberikan prioritas tinggi sebagaimana kunci-kunci sukses lain diperlakukan.

b. Dialokasikannya sejumlah sumber daya (manusia, finansial, tenaga, waktu, informasi, dan lain-lain) disetiap tataran pemerintahan untuk membangun konsep ini dengan semangat lintas sektoral.
c. Dibangunnya berbagai infrastruktur dan superstruktur pendukung agar tercipta lingkungan kondusif untuk mengembangkan *E-Government* (seperti adanya Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang jelas, ditugaskannya lembaga-lembaga khusus misalnya kantor *E-Envoy* sebagai penanggung jawab utama, disusunnya aturan main kerja sama dengan swasta, dan lain sebagainya).
d. Disosialisasikannya konsep *E-Government* secara merata, kontinyu, konsisten, dan menyeluruh kepada seluruh kalangan birokrat secara khusus dan masyarakat secara umum melalui berbagai cara kampanye yang simpatik.

2. *Capacity*

Yang dimaksud dengan elemen kedua ini adalah adanya unsur kemampuan atau keberdayaan dari pemerintah setempat dalam mewujudkan "impian" terkait *E-Government* menjadi kenyataan. Ada 3 (tiga) hal minimum yang paling tidak harus dimiliki oleh pemerintah sehubungan dengan elemen ini, yaitu:

a. Ketersediaan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan berbagi inisiatif *E-Government*, terutama yang berkaitan dengan sumber daya finansial.
b. Ketersedaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai karena fasilitas ini merupakan 50% dari kunci keberhasilan penerapan konsep *E-Government*.

c. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan agar penerapan *E-Government* dapat sesuai dengan asas manfaat yang diharapkan.

Perlu diperhatikan bahwa ketiadaan satu atau lebih elemen prasyarat tersebut janganlah dijadikan alasan tertundanya sebuah pemerintah tertentu dalam usahanya untuk menerapkan *E-Government*, terlebih karena banyaknya fasilitas dan sumber daya krusial yang berada di luar jangkauan (wilayah kontrol) pemerintah. Justru pemerintah harus mencari cara yang efektif agar dalam waktu cepat dapat memiliki ketiga prayarat tersebut, misalnya melalui usaha-usaha kerja sama dengan swasta, bermitra dengan pemerintah daerah/negara tetangga, merekrut SDM terbaik dari sektor non publik, mengalihdayakan *(outsourcing)* berbagai teknologi yang tidak dimiliki, dan lain sebagainya.

3. *Value*

Elemen pertama dan kedua merupakan dua buah aspek yang dilihat dari sisi pemerintah selaku pihak pemberi jasa *(supply side).* Berbagai inisiatif *E-Government* tidak akan ada gunanya jika tidak ada pihak yang merasa diuntungkan dengan adanya implementasi konsep tersebut. Dalam hal ini, yang menentukan besar tidaknya manfaat yang diperoleh dengan adanya *E-Government* bukanlah kalangan pemerintah sendiri, melainkan masyarakat dan mereka yang berkepentingan *(demand side).* Untuk itulah maka pemerintah harus benar-benar teliti dalam memilih prioritas jenis *aplikasi E-Government* apa saja yang harus didahulukan pembangunannya agar benar-benar memberikan *value* (manfaat) yang secara signifikan dirasakan oleh masyarakatnya. Salah dalam mengerti apa yang dibutuhkan masyarakat justru

akan mendatangkan bumerang bagi pemerintah yang akan semakin mempersulit meneruskan usaha mengembangkan konsep *E-Government*.

Perpaduan antara ketiga elemen terpenting di atas akan membentuk sebuah nexus atau pusat syaraf jaringan *E-Government* yang akan merupakan kunci sukses utama penjamin keberhasilan. Atau dengan kata lain, pengalaman memperlihatkan bahwa jika elemen yang menjadi fokus sebuah pemerintah yang berusaha menerapkan konsep *E-Government* berada di luar area tersebut (ketiga elemen pembentuk nexus) tersebut maka probabilitas kegagalan proyek tersebut akan tinggi. Penelitian ini akan menggunakan ketiga elemen tersebut sebagai landasan analisis terhadap implementasi aplikasi E-SAKIP di Kabupaten Demak.

Pada penelitian ini Pemerintah Kabupaten Demak telah melaksanakan *E-Government*. Aplikasi Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Kabupaten Demak adalah aplikasi E-SAKIP yang diakses melalui laman http://sakip.demakkab.go.id/ . Aplikasi E-SAKIP adalah aplikasi yang dibangun oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Demak guna melakukan fasilitasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada 41 (empat puluh satu) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak. Peneliti menggunakan teori hasil kajian dan riset dari *Harvard JFK Shool of Government*, bahwa untuk menerapkan konsep-konsep digitalisasi pada sektor publik, ada tiga elemen sukses yang harus dimiliki dan diperhatikan sungguh-sungguh. Masing-masing elemen sukses tersebut adalah: *Support, Capaity,* dan *Value* (Indrajit, 2016).

1.7. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kajian teori di atas, maka kerangka pikir dari penelitian ini adalah pada gambar berikut :

Gambar 1.3
Kerangka Pemikiran

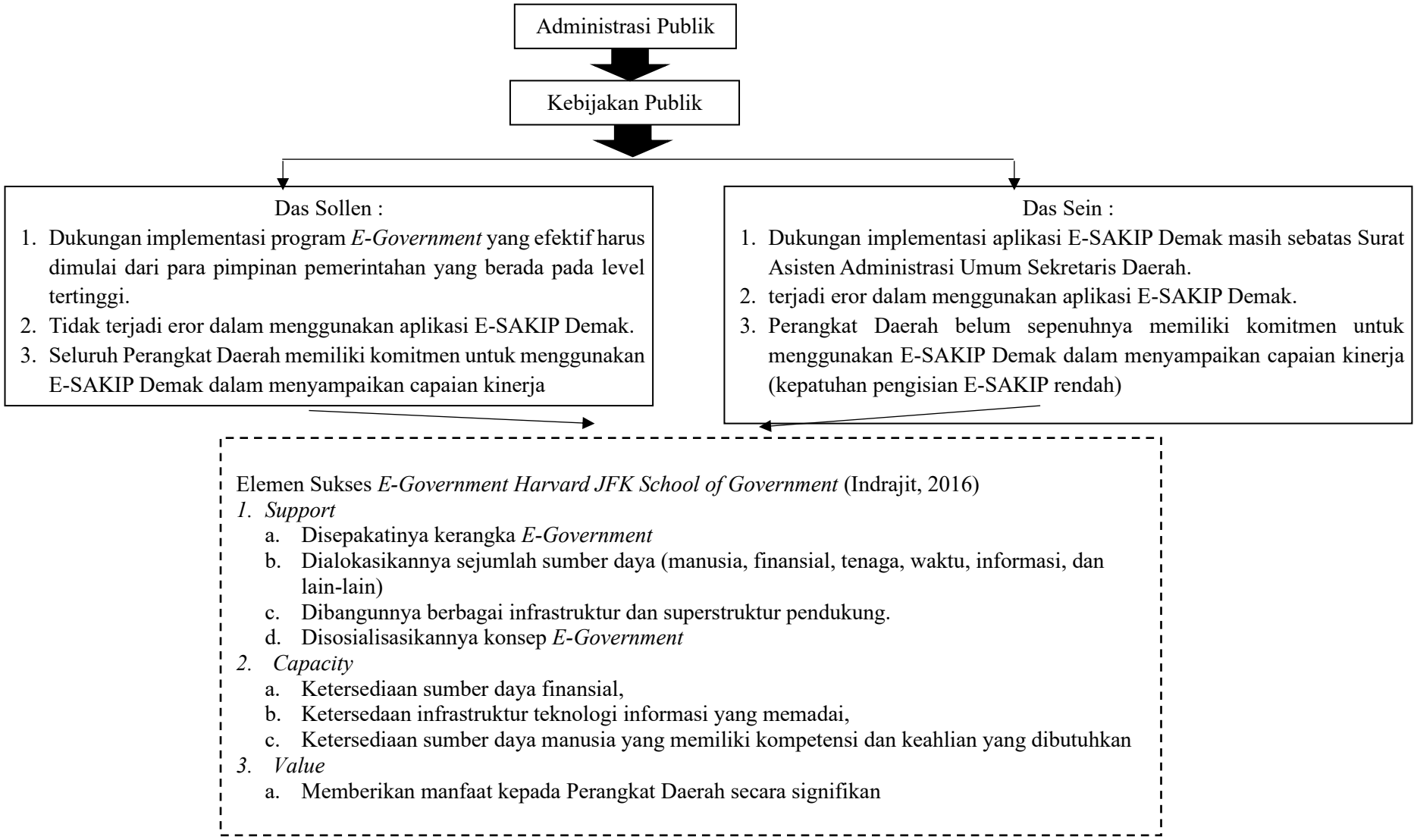

1.8. Definisi Konsep dan Definisi Operasional

1.8.1 Definisi Konsep

E-Government

Menurut hasil kajian dan riset dari *Harvard JFK School of Government*, untuk menerapkan konsep-konsep digitalisasi pada sektor publik, ada 3 (tiga) elemen sukses yang harus dimiliki dan diperhatikan sungguh-sungguh. Masing-masing elemen sukses tersebut adalah: *Support, Capacity, dan Value* (Indrajit, 2016).

1.8.2 Definisi Operasional

E-Government

Variabel *E-Government* diukur dengan menggunakan indikator :

a. *Support*

(1) Disepakatinya kerangka *E-Government.*

Terdapat regulasi E-SAKIP dari Pemerintah Kabupaten Demak.

(2) Dialokasikannya sejumlah sumber daya (manusia, finansial, tenaga, waktu, informasi, dan lain lain).

1. SDM pengelola E-SAKIP tercantum dalam Peta Jabatan.
2. Terdapat regulasi yang mengatur finansial/ anggaran E-SAKIP.

(3) Dibangunnya berbagai infrastruktur dan superstruktur pendukung.

Telah dibangun infrastruktur dan superstruktur pendukung

(4) Disosialisasikannya konsep *E-Government.*

Aplikasi E-SAKIP sudah disosialisasikan.

b. *Capacity*

(1) Ketersediaan sumber daya finansial.

Terdapat sumber daya financial.

(2) Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memada i.

Tersedianya infrastruktur teknologi informasi yang memadai.

(3) Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan.

Tersedianya pegawai yang mengampu E-SAKIP sesuai dengan kompentensi dan keahlian yang dibutuhkan.

c. *Value*

(1) Memberikan manfaat kepada Perangkat Daerah secara signifikan.

1. Dapat diakses dimanapun dan kapanpun
2. Manfaat dalam Perencanaan Kinerja
3. Manfaat dalam Pengukuran Kinerja
4. Manfaat dalam Pelaporan Kinerja
5. Manfaat dalam Evaluasi Kinerja
6. Dasar *Reward & Punishment* bagi ASN

Tabel 1.5
Definisi Operasional

Variabel	Indikator	Sub Indikator	Pernyataan	Item Pernyataan
E-Government	*Support*	Disepakatinya kerangka *E-Government*	Sudah ada regulasi tentang E-SAKIP dalam bentuk Peraturan Bupati	1
			Sudah ada regulasi tentang E-SAKIP yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah	2
			Regulasi E-SAKIP telah disosialisasikan pada Instansi saya bekerja	3
		Dialokasikannya sejumlah sumber daya (manusia, finansial, tenaga, waktu, informasi, dan lain-lain)	Sumber daya manusia yang mengelola E-SAKIP di Instansi saya bekerja tercantum dalam Peta Jabatan	4
			Kegiatan yang berkaitan dengan E-SAKIP tercantum dalam Dokumen Pelaksana Anggaran Perangkat Daerah	5
		Dibangunnya berbagai infrastruktur dan superstruktur pendukung	Terdapat internet di tempat kerja	6
		Disosialisasikannya konsep *E-Government*	Saya pernah mengikuti sosialisasi penggunaan aplikasi E-SAKIP	7
			Sosialisasi penggunaan aplikasi E-SAKIP dilaksanakan secara rutin minimal 1 tahun sekali	8
			Setelah mengikuti sosialisasi saya menjadi paham	9
	Capacity	Ketersediaan sumber daya finansial	Anggaran yang dimiliki Bagian Organisasi Setda selaku koordinator E-SAKIP Kabupaten telah mencukupi seluruh kegiatan yang bekaitan dengan E-SAKIP Perangkat Daerah	10
			Instansi saya bekerja telah memiliki kecukupan anggaran dalam menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan E-SAKIP	11

Variabel	Indikator	Sub Indikator	Pernyataan	Item Pernyataan
			Di Instansi saya bekerja pernah dilaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan E-SAKIP namun tidak ada anggarannya	12
		Ketersedaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai	Di Instansi saya bekerja internet memiliki kualitas yang baik	13
			Di Instansi saya bekerja disediakan PC komputer desktop untuk mengakses E-SAKIP	14
			Di Instansi saya bekerja disediakan notebook/ laptop untuk mengakses E-SAKIP	15
			Saya dapat mengakses E-SAKIP melalui smartphone android	16
			Saya dapat mengakses E-SAKIP melalui iphone	17
			Di Instansi saya bekerja PC komputer desktop, Notebook/ Laptop jumlahnya telah terpenuhi untuk mengakses E-SAKIP	18
			Saya mengakses E-SAKIP tidak pernah eror	19
			Pada aplikasi E-SAKIP tersedia menu pengaduan	20
			Bagian Organisasi Setda selaku koordinator E-SAKIP Kabupaten menyediakan Layanan dan konsultasi integrasi system missal WA grup	21
		Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan	Jabatan Kepala Dinas selaku penanggungjawab SAKIP tidak terjadi kekosongan di Instansi saya bekerja	22
			Jabatan Kasubbag Program tidak terjadi kekosongan di instansi saya bekerja	23
			Di Instansi saya bekerja jabatan staf yang membidangi E-SAKIP tidak terjadi kekosongan	24
			Instansi saya bekerja tidak menggunakan jasa pihak lain dalam mengisi E-SAKIP	25

Variabel	Indikator	Sub Indikator	Pernyataan	Item Pernyataan
			Di Instansi saya bekerja sudah ada pegawai yang mengikuti pelatihan/ Bintek E-SAKIP level Kabupaten	26
			Di Instansi saya bekerja sudah ada pegawai yang mengikuti pelatihan/ Bintek E-SAKIP level Provinsi	27
			Di Instansi saya bekerja sudah ada pegawai yang mengikuti pelatihan/ Bintek E-SAKIP level Nasional	28
	Value	Memberikan manfaat secara signifikan	Saya lebih memilih E-SAKIP daripada laporan manual dalam melaporkan capaian kinerja triwulanan ke Bag. Organisasi Setda	29
			Saya dapat mengakses E-SAKIP dimanapun (tidak harus ditempat kerja)	30
			E-SAKIP membantu saya dalam perencanaan kinerja	31
			E-SAKIP membantu saya dalam pengukuran kinerja	32
			E-SAKIP membantu saya dalam Pelaporan Kinerja (penyusunan laporan capaian kinerja triwulanan, penyusunan LKjIP tahunan)	33
			E-SAKIP membantu saya dalam evaluasi kinerja	34
			E-SAKIP digunakan sebagai dasar pemberian reward dan punishment bagi ASN	35

1.9. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif.

a. Tipe penelitian

Penelitian deskriptif

penelitian deskriptif dimaksudkan untuk mengukur dengan cermat fenomena sosial tertentu. Peneliti mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis (Effendi & Tukiran, 2017). Tipe penelitian ini digunakan untuk menggambarkan karakteristik variabel *support, capacity,* dan *value* dalam implementasi *E-Government* pada aplikasi Elektronik Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (E-SAKIP) Kabupaten Demak.

b. Ruang Lingkup/Fokus

Penelitian akan menganalisis elemen sukses pengembangan *E-Government*, yaitu : *support, capacity, value* pada aplikasi Elektronik Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (E-SAKIP) Kabupaten Demak.

c. Jenis dan Sumber Data

Primer : Kuesioner/Angket dan observasi

Sekunder : Dokumentasi dari laporan, dokumen, dan literatur terkait.

d. Populasi dan Teknik Pengambilan Sempel

Populasi dalam penelitian ini yaitu semua peserta dalam kegiatan *Desk* Penyusunan Pohon Kinerja dikaitkan langsung dengan Perjanjian Kinerja serta Kepatuhan penginputan data kinerja pada E- SAKIP Kabupaten Demak yang diselenggarakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

pada 5 – 17 Maret 2025 di Ruang Rapat Staf Ahli Bupati Sekretariat Daerah Kabupaten Demak yang terdiri dari Kepala Perangkat Daerah, Kasubbag Program, Staf yang membidangi SAKIP pada 41 (empat puluh satu) Perangkat Daerah di Kabupaten Demak yang menggunakan E-SAKIP.

Tabel 1.6
Penentuan Sampel Metode Krejcie-Morgan

Populasi (N)	**Sampel (n)**	**Populasi (N)**	**Sampel (n)**	**Populasi (N)**	**Sampel (n)**
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	360	186	2600	335
70	59	380	191	2800	338
75	63	400	196	3000	341
80	66	420	201	3500	346
85	70	440	205	4000	351
90	73	460	210	4500	354
95	76	480	214	5000	357
100	80	500	217	6000	361
110	86	550	226	7000	364
120	92	600	234	8000	367
130	97	650	242	9000	368
140	103	700	248	10000	370
150	108	750	254	15000	375
160	113	800	260	20000	377
170	118	850	265	30000	379
180	123	900	269	40000	380
190	127	950	274	50000	381
200	132	1000	278	75000	382
210	136	1100	285	1000000	384

Sumber: Effendi & Tukiran, 2017

Definisi sampel menurut Husain & Purnomo dalam (Hardani et al., 2020) adalah sebagian anggota populasi yang diambil dengan menggunakan teknik pengambilan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah 3 x 41 = 123. Untuk menentukan sampel pada penelitian ini, dengan ini peneliti akan menggunakan metode Krejcie-Morgan. Apabila menggunakan tabel Krejcie dan Morgan maka sampel dalam penelitian ini adalah sebesar 92 orang. Peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel *simple random sampling,* yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu (Sugiyono, 2018).

e. Teknik Pengumpulan Data

1. Metode Angket.

   Angket adalah Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada orang lain yang dijadikan responden untuk dijawabnya. Metode Angket dilakukan melalui tatap muka langsung ataupun, maupun melalui kuesioner surat (baik melalui surat dalam bentuk kertas maupun surat elektronik (Hendryadi, dkk, 2015).

   Skala yang digunakan adalah skala Guttman, yaitu skala kumulatif yang menggambarkan sikap seseorang pada suatu hal, kondisi atau situasi melalui pilihan jawaban tegas. Skala Guttman terdiri dari dua pilihan jawaban Ya – Tidak (Hendryadi, dkk, 2015)

yang mengukur persepsi responden terhadap indikator *support, capacity*, dan *value.* Nilai tertinggi (1) untuk jawaban Ya dan terendah (0) untuk jawaban Tidak.

2. Metode Observasi

   Makna observasi dalam konteks penelitian sosial adalah melihat, mendengar, dan merasakan (mengalami sendiri) secara langsung hal/keadaan yang diteliti. Peneliti biasanya mendapatkan serta mencatat/merekam data/informasi selama observasi tersebut. Lapangan maksudnya mengunjungi/berada langsung di tempat penelitian (Alfatih, 2021). Peneliti melakukan observasi pada kegiatan Desk Penyusunan Pohon Kinerja dikaitkan langsung dengan Perjanjian Kinerja serta Kepatuhan penginputan data kinerja pada E-SAKIP Kabupaten Demak yang diselenggarakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah pada 5 – 17 Maret 2025 di Ruang Rapat Staf Ahli Bupati Sekretariat Daerah Kabupaten Demak. Dilanjutkan observasi pada kegiatan Desk Implementasi E-SAKIP dan kelengkapan dokumen SAKIP pada E-SAKIP Reviu KemenpanRB yang diselenggarakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah pada 14 – 16 Mei 2025 di Ruang Rapat Staf Ahli Bupati Sekretariat Daerah Kabupaten Demak.

3. Dokumentasi.

Dokumentasi merupakan salah satu cara dalam mengumpulkan data penelitian secara tidak langsung, artinya data didapatkan melalui dokumen-dokumen pendukung yang berhubungan dengan data yang akan diteliti (Sugiyono, 2018). Peneliti menggunakan laporan, dokumen, dan literatur terkait yang mendukung *support, capacity* dan *value* aplikasi E-SAKIP Kabupaten Demak.

f. Teknik Analisis Data

Pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan JASP *Statistics* versi 0.19.3.0. Aplikasi JASP merupakan singkatan dari *Jeffrey's Amazing Statistics Program* sebagai bentuk penghargaan atas pelopor analisa statistik Bayesian, Sir Harold Jeffreys. Aplikasi ini terus dikembangkan dan terus diperbarui oleh sekelompok peneliti di *University of Amsterdam*. JASP *Statistics* digunakan untuk menguji :

(1). Validitas data dan Reliabilitas data

(2). Statistik Deskriptif untuk untuk melihat tingkat pencapaian indikator masing-masing elemen.

(3). Uji binomial untuk menguji proporsi jawaban Ya/Tidak pada setiap item pertanyaan.